



MODUL
TEMA 13

Langkah Tegap Pemuda

SEJARAH INDONESIA PAKET C SETARA SMA/MA



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

MATERI

A. Kilas Balik Awal Perjuangan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda

Sejarah perjuangan pemuda di tahun 1908, diawali ketika pemuda mendirikan wadah perjuangan pertama kali di Jakarta dengan nama "Boedi Oetomo" dengan struktur organisasi modern. Tujuan didirikannya perkumpulan Boedi Oetomo adalah propaganda kemerdekaan Indonesia melalui pengembangan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Boedi Oetomo memandang bahwa intelektualitas dan budaya merupakan bagian dari jati diri sebuah bangsa dan dari sanalah maka kebijakan dan wawasan terhadap bangsa ditumbuhkan. Karakter penjajahan kolonial yang menerapkan politik diskriminatif bahkan menindas, memeras, dan tidak memberikan hak kepada kaum pribumi, mendorong Boedi Oetomo untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik yang menyangkut nasib bangsanya sendiri. Hal tersebut membuat Boedi Oetomo disenangi oleh semua lapisan masyarakat.

Kehadiran perkumpulan Boedi Oetomo pada masa itu merupakan suatu periode sejarah yang ditandai dengan munculnya kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai aktor terdepan yang dikenal dengan nama angkatan pembaharu. Perkumpulan Boedi Oetomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang kemudian disambut oleh Soetomo dan rekan-rekannya di *School Tot Opleiding Van Indische Arsten (STOVIA)* atau Sekolah Dokter Pribumi.

Wadah pergerakan pemuda inilah yang menjadi awal dari semangat persatuan dan kesatuan, semangat senasib dan seperjuangan, semangat untuk bergerak demi dua kata, yakni "Indonesia Merdeka". Benih-benih perjuangan para pemuda saat itu mengakar kuat dan tumbuh subur di kalangan para pemuda. Berawal dari organisasi ini maka mulai berkembanglah organisasi-organisasi modern di Indonesia.

Setelah 20 tahun lahirnya Boedi Oetomo, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 membuktikan bahwa semangat pergerakan telah tumbuh dengan kuat. Kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, dan aktivis pemuda itu menumbuhkan generasi baru pemuda Indonesia yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Sumpah Pemuda menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia yang dicetuskan melalui Kongres Pemuda II yang berlangsung di Batavia atau Jakarta pada tanggal 26-28 Oktober 1928 yang diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang anggotanya merupakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. PPPI adalah suatu bentuk organisasi yang menghimpun seluruh elemen gerakan mahasiswa yang bersifat kebangsaan.

Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda adalah ikrar yang dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Harapan dari keputusan tersebut ialah agar menjadi azas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan disiarkan dalam semua surat kabar serta dibacakan oleh perkumpulan setiap menyelenggarakan pertemuan.

B. Peran Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Setiap generasi menciptakan sejarahnya sendiri, artinya bahwa setiap generasi yang ada dan hidup pada masanya telah mengoreskan catatan emas di setiap eksistensinya dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam buku "Gerakan 30 September, pelaku, pahlawan dan petualang" catatan Julius Pour menjelaskan bahwa kondisi politik di Indonesia periode 60-an baru lolos dari krisis. Pada masa kecemerlangan kepemimpinan Soekarno, lambat laun terancam perpecahan atas kecaman sejumlah panglima militer Angkatan Darat (AD).

Masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin berlangsung antara tahun 1959 sampai 1966, dimulai sejak Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keluarnya Dekrit Presiden ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan keamanan dan keselamatan negara. Dalam

istilah hukum ketatanegaraan, keluarnya Dekrit Presiden berlandaskan pada hukum keselamatan negara dalam bahaya yang luar biasa yang terpaksa dijalankan.

Adapun isi Dekrit Presiden 5 juli 1959 adalah:

1. Dibubarkannya Konstituante;
2. Diberlakukannya kembali UUD 1945;
3. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950; dan
4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Pada tanggal 25 Oktober 1965, lahir Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayor Jenderal dr. Syarie Thayeb. Organisasi tersebut diantaranya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Gerakan yang awalnya hanya bersifat lokal di kampus masing-masing kemudian membentuk suatu aliansi yang besar dengan terbentuknya organisasi KAMI. Gerakan moral yang disampaikan kaum muda khususnya mahasiswa tersebut menandai munculnya sebuah generasi baru yaitu angkatan tahun 1966 atau populer disebut Angkatan 66. Hal inilah yang membedakan dengan gerakan mahasiswa sebelum tahun 1966 yang masih bersifat kedaerahan, sehingga Angkatan 66 menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. Tokoh-tokoh Angkatan 66 antara lain Cosmas Batubara, Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi. Ketiga tokoh tersebut berasal dari PMKRI, sedangkan Akbar Tanjung berasal dari HMI. Angkatan 66 mengangkat isu komunis sebagai ancaman bagi bangsa.

Tiga tuntutan dari KAMI yang disampaikan kepada pemerintah adalah: Bubarkan PKI; Bubarkan Kabinet Dwikora, dan Turunkan Harga. Tiga tuntutan tersebut disebut Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Tujuan dari gerakan ini terutama agar aktivis mahasiswa Indonesia dapat menggalang aksi dan melancarkan demonstrasi menuntut pembubaran PKI. Selain itu, lahirnya KAMI terdorong dengan peristiwa sebelumnya, yaitu penculikan dan pembunuhan terhadap enam Jenderal dan satu perwira pertama oleh gerombolan Gerakan 30 September (G 30 S).

Setelah runtuhnya pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan terpilihlah Soeharto menjadi Presiden yang menandai Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin maka pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem Demokrasi Pancasila. Dengan visi utama adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuensi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan perubahan-perubahan politik.

Pada bidang ekonomi, pemerintahan Orde Baru membuat rancangan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Melalui rancangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbeda pada bidang politik, pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan '*floating mass*' atau Massa Mengambang sebagai kebijakan politik yang membatasi aktivitas politik (partai politik) hanya sampai di tingkat kabupaten, bahkan ada larangan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda untuk ikut dalam politik praktis.

Namun dalam perjalanan waktu, pemerintahan Orde Baru sudah mulai menyimpang dan semakin menjauh dari pemerintahan yang demokratis berdasarkan UUD 1945 sesuai visi semula. Tidak ada perubahan substantif dari kehidupan politik Indonesia antara pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama karena ternyata sama-sama pemerintahan otoriter. Kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia, bahkan menjadi pengontrol utama lembaga negara lain (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun Lembaga lainnya (LSM, Partai Politik dan sebagainya).

Isu pelanggaran hak asasi manusia menjadi sorotan masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Termasuk pada masalah kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers. Beberapa media massa dicabut surat ijin penerbitannya atau dibredel setelah mengeluarkan laporan kasus penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara. Salah satu upaya pemerintah memperkuat kekuasaannya dengan memberlakukan Undang-undang Subversif. Seiring berjalananya waktu, pada awal tahun 1970, mahasiswa mulai melancarkan berbagai kritik dan koreksi terhadap praktik kekuasaan rezim pemerintah Orde Baru dengan melakukan golput (golongan putih) yang menentang pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru tahun 1972 karena dinilai curang. Pada awal tahun 1973 presiden Soeharto mengambil keputusan besar dalam kebijakan perekonomian Indonesia, dengan melakukan kerjasama dengan pihak asing sebagai penanam modal di Indonesia terutama dalam pembangunan infrastruktur. Tujuan utama kebijakan tersebut adalah memecahkan masalah pengangguran dan pendapatan negara, namun ada golongan yang menganggap bahwa Indonesia perlukan akan kembali dijajah melalui cara yang lebih halus.

Kebijakan politik dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah Orde Baru menuai sikap prokontra, dimana ada sekelompok masyarakat yang mendukung namun ada juga yang menolak meski tanpa bisa berbuat banyak. Catatan sejarah membuktikan bahwa pada situasi dan kondisi tertentu kaum muda selalu tampil ke permukaan sebagai inisiator dan pendobrak kemapanan. Salah satunya melalui peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Jaruari) adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 15 - 16 Januari 1974 di Jakarta pada saat kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Bermula dari aksi demonstrasi kemudian berkembang menjadi kerusuhan yang membakar toko-toko di Jakarta, terutama miliki etnis Tionghoa.

Tanggal 16 Januari 1998 lebih dari 500 mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar aksi yang menuntut pemerintah segera menyelesaikan krisis moneter dan menurunkan harga-harga. Aksi mahasiswa ITB tersebut kemudian disusul oleh aksi sekitar 1000 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) pada tanggal 19 Februari 1998 dengan melakukan aksi demonstrasi di dalam kampus UI Depok, Provinsi Jawa Barat. Tuntutan mahasiswa ITB dan UI ini berkembang dan mendapat dukungan dari semua Perguruan Tinggi di Indonesia dengan menyerukan lengsernya rezim Orde Baru.

Gerakan mahasiswa di kampus-kampus, seperti ITB, UI, dan PT lainnya semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI melalui Sidang Umum MPR 1998 pada tanggal 2 Maret 1998. Pengangkatan kembali Soeharto yang ke-7 kalinya sebagai presiden menyulut kemarahan mahasiswa. Aksi mahasiswa semakin meluas dan agresif serta mengakibatkan timbulnya demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah dengan melibatkan para staf akademis maupun pimpinan universitas.

Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI, kekuatan oposisi (partai penentang) yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan.

Pada tanggal 18 Mei 1998 mahasiswa mengadakan *long march* (berjalan jauh) menuju kompleks gedung MPR/DPR Senayan, dan berhasil menguasainya.

Akhirnya, setelah demonstrasi besar-besaran yang dipelopori mahasiswa semakin agresif dan tidak bisa dibendung serta menimbulkan banyak korban, pada bulan Mei 1998 Soeharto meletakkan jabatannya.

Dengan Mundurnya Soeharto maka pemerintahan yang dalam sejarah bangsa Indonesia dikenal dengan Orde Baru berakhir. Pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998 menandai runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia.

Masa selanjutnya disebut sebagai era Reformasi.

Reformasi yang digalang sejak 1998 merupakan formulasi menuju Indonesia dengan tatanan baru, maka diperlukan agenda reformasi yang jelas dengan penetapan skala prioritas, pentahapan pelaksanaan, dan kontrol agar tepat tujuan dan sasaran. Visi reformasi memuat 6 (enam) hal yang merupakan agenda gerakan mahasiswa sebagai tolak ukur untuk menilai apakah perjalanan reformasi telah sesuai dengan tuntutan hati Nurani rakyat. Keenam hal itu adalah:

1. Penegakan supremasi hukum dengan jalan pengadilan terhadap Soeharto. Selama 32 tahun berkuasa Soeharto telah melakukan pelanggaran di bidang politik dan ekonomi sehingga membawa bangsa Indonesia ke dalam krisis berkepanjangan.
2. Hapus Dwi Fungsi ABRI/TNI. Pencabutan dwi fungsi ABRI, diantaranya dengan mencabut keberadaan anggota ABRI/TNI yang diangkat menjadi anggota DPR/MPR dan keberadaan militer aktif di birokrasi pemerintahan. ABRI/TNI harus steril dari kehidupan politik karena kedudukannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
3. Amandemen UUD 1945. UUD 1945 yang telah dihasilkan oleh *founding fathers* bukan suatu yang final karena dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat.

Masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan. Contoh yang paling nyata adalah pasal tentang pembatasan masa jabatan presiden. Agar UUD 1945 tidak dijadikan alat penguasa untuk menjadikan sistem politik yang otoriter, maka harus ada amandemen terhadap beberapa pasal tentang hal tersebut.

4. Otonomi daerah seluas-luasnya. Sentralisasi yang selama ini dijalankan telah menghasilkan ketidakadilan sehingga menumbuhkan kekecewaan yang luar biasa dari daerah. Daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar belum merasakan kemakmuran sebagaimana mestinya. Kekayaan-kekayaan daerah dieksplorasi dan yang merasakan manfaatnya justru orang-orang pusat, sedangkan daerah mendapatkan bagian yang tidak proporsional. Untuk mengakhiri ketidakadilan dan kekecewaan yang lebih luas yang pada akhirnya akan menimbulkan disintegrasi bangsa, maka daerah harus diberikan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Hal ini bisa terwujud ketika ada “*political will*” dari pusat.
5. Penegakan Budaya Demokrasi Rasional. Demokrasi yang selama ini dibangun masih dikotori dengan budaya kekerasan atau budaya yang tidak rasional yang menghambat penegakan demokrasi di Indonesia. Untuk itulah semua elemen bangsa harus bekerja memberikan pendidikan politik kepada rakyat agar anarkisme dan segala bentuk budaya yang tidak masuk akal segera terkikis.
6. Pertanggungjawaban Orde Baru. Selama 32 tahun Orde Baru telah melakukan banyak pelanggaran, sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998, malam harinya setelah dilantik sebagai Presiden, di Istana Merdeka, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut dapat dikatakan merupakan visi kepemimpinan B.J. Habibie guna menjawab tuntutan Reformasi secara cepat dan tepat. Hal penting dari pidato tersebut adalah bahwa kabinetnya akan menyiapkan proses reformasi 3 (tiga) bidang yaitu:

1. bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilihan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
2. bidang hukum antara lain meninjau kembali Undang-Undang Subversi.
3. bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Di samping itu pemerintah akan tetap melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati dengan pihak luar negeri, khususnya dengan melaksanakan program reformasi ekonomi sesuai dengan kesepakatan dengan *International Monetary Fund (IMF)*.

Pemerintah akan tetap menjunjung tinggi kerjasama regional dan internasional, seperti yang telah dilaksanakan selama ini dan akan berusaha dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

mengembalikan dinamika pembangunan bangsa Indonesia yang dilandasi atas kepercayaan nasional dan internasional yang tinggi.

Dengan demikian pemerintahan B.J.Habibie sebagai pemerintahan transisi sehingga ada beberapa kebijakan yang bersifat melanjutkan pemerintahan sebelumnya namun ada beberapa kebijakan yang mendasar yang ditetapkan secara khusus. Pemerintahan B.J Habibie akan komitmen pada aspirasi rakyat dan menetapkan fokus perhatian pada tiga bidang utama, yaitu untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi, meningkatkan kehidupan politik demokrasi dan menegakkan kepastian hukum.

Beberapa momentum penting selama masa transisi dari pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi antara lain: Tragedi Trisakti di Jakarta yang diikuti Peristiwa Gejayan Yogyakarta, serta meningkatnya suhu politik yang ditandai dengan aksi penjarahan di Jakarta dan daerah lain, aksi mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR, sampai akhirnya memaksa presiden Suharto mengundurkan diri dan mengangkat B.J Habibie selaku Wakil Presiden menjadi Presiden.

Tragedi Trisakti bermula dari kegiatan unjuk rasa mahasiswa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Denpasar kemudian bersama empat organisasi mahasiswa lainnya mengajukan usulan penyelenggaraan Sidang Umum MPR kedua. Sampai akhirnya, pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besarbesaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memakan enam korban jiwa dari kalangan mahasiswa, yaitu Elang Mulya Lesmana, Hery Hertanto, Hendirawan Lesmana, dan Hafi dhin Royan.

Dengan mundurnya Suharto sebagai presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memerintah selama 32 tahun maka pemerintahan yang dalam Sejarah Indonesia dikenal dengan Rezim Orde Baru telah berakhir. Proses pergantian pemerintahan ternyata tidak berjalan dengan mudah dan menimbulkan pergolakan politik di tanah air. Semua elemen masyarakat menginginkan terbentuknya pemerintahan yang bersih dan memihak rakyat.

Meskipun secara yuridis formal sudah ada pemerintahan yang sah di bawah pimpinan B.J Habibie namun suhu politik tetap semakin memanas.

Rangkuman

1. Boedi Oetomo memandang bahwa intelektualitas dan budaya merupakan bagian dari jati diri sebuah bangsa dan dari sanalah maka kebijakan dan wawasan terhadap bangsa ditumbuhkan. Keberadaan Boedi Oetomo yang lahir pada masa penjajahan colonial yang berkarakter menindas, menghisap dan tidak memberikan hak kepada kaum pribumi untuk berpartisipasi di dalam masalah-masalah politik yang menyangkut nasib bangsanya sendiri.
2. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan ikrar yang dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Keputusan tersebut diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam semua surat kabar dan dibacakan di setiap pertemuan perkumpulan.
3. Proses panjang perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan untuk mewujudkan suatu negara merdeka yang berdaulat telah dilalui dengan penuh dinamika. Terlebih bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultur yang merupakan himpunan dari berbagai etnis dengan kebudayaan dan peradabannya masing-masing. Keberagaman dimaksud selain menjadi kebanggaan bersama sekaligus menjadi tantangan karena potensi disintegrasi akan selalu terbuka. Namun demikian kita patut berbangga karena memiliki kesamaan tekad hidup sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang diikat melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dinamika proses kemerdekaan juga diwarnai dengan perbedaan pandangan baik dari golongan tua maupun golongan muda, dan juga pandangan lain yang dilandasi dari kultur masing-masing etnis termasuk agama dan kepercayaannya, bahkan perbedaan pandangan dari masing-masing tokoh. Salah satu contoh nyata adalah peristiwa Rengasdengklok, dimana terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi pelaksanaan proklamasi. Namun dengan semangat musyawarah mufakat akhirnya bangsa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
4. Pada era tahun 1960 an Indonesia mengalami masa ketegangan politik yang meruncing dalam peristiwa 30 September 1965. Sementara kondisi perekonomian rakyat cukup meresahkan,

harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Situasi tersebut memberi stimulan pada kaum muda kali ini para mahasiswa yang bersama-sama partai politik, organisasi pemuda, melakukan gerakan moral (*moral force*).

5. Angkatan 66 menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. Angkatan 66 adalah angkatan anti Soekarno, angkatan yang berusaha untuk menjatuhkan kepemimpinan Soekarno. Angkatan 66 ini dibentuk atas keinginan mahasiswa yang sudah dimulai sejak masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1966. Akan tetapi, pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1966, mahasiswa berusaha untuk meninjau kembali Dekrit Presiden. Tujuan peninjauan kembali Dekrit Presiden tersebut adalah untuk memperlemah kepemimpinan Soekarno, yang pada saat itu mempunyai kedudukan dan pengaruh yang besar dalam sistem perpolitikan di Indonesia.
6. Gerakan angkatan 66 pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan mendirikan Orde Baru. Gerakan ini sebagai awal kebangkitan dan kesadaran mahasiswa secara nasional. Tokoh-tokoh Angkatan 66 antara lain Cosmas Batubara, Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi. Ketiga tokoh tersebut berasal dari PMKRI, sedangkan Akbar Tanjung berasal dari HMI. Angkatan 66 mengangkat isu komunis sebagai ancaman bagi bangsa. Lahirnya gerakan ini berhasil membangun kepercayaan rakyat untuk mendukung mahasiswa menentang paham komunis yang bernaung dibawah PKI. Sejak September 1997 krisis ekonomi global ikut menyapu Indonesia, nilai rupiah terhadap dolar AS melemah, harga-harga barang kebutuhan pokok mulai merangkak naik, banyak perusahaan yang bangkrut, akibatnya banyak buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
7. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia juga melibatkan para staf akademis maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksinya di kampus di berbagai kota, yaitu tuntutan penurunan harga sembako (sembilan bahan pokok), penghapusan monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta suksesi kepemimpinan nasional.
8. B.J. Habibie menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional maka dibentuklah kabinet baru yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Presiden B.J. Habibie mengemban tugas untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Mewujudkan era reformasi yang dicita-citakan bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi menjadi tanggungjawab kita bersama. Semua komponen bangsa ini harus mampu berperan optimal sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing. Sebagai pelajar Anda diharapkan dapat menuntut ilmu sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
Ketekunan dan usaha keras menjadi jalan untuk meraih kehidupan yang dicita-citakan.
Sehingga dapat berperan aktif dalam mewujudkan reformasi yang dicita-citakan.

EVALUASI

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara mengetik huruf a, b, c, d, atau e untuk jawaban yang tepat dan benar pada kolom yang telah disediakan !

- Organisasi modern yang menjadi simbol kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya
 - Tiga Serangkai
 - Sarekat Islam
 - Taman Siswa
 - Boedi Oetomo
 - Indische Partij*
 - Tokoh pergerakan nasional yang dikenal sebagai Tiga Serangkai terdiri dari ...
 - Sartono, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara
 - Cipto Mangunkusumo, Daowes Dekker, Suwardi Suryaningrat
 - Sartono, Wahidin Sudiro Husodo, Daowes Dekker
 - Dauwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, Wahidin Sudiro Husodo,
 - Sutomo, Dowes Dekker, Ki hajar Dewantara
 - Salah satu faktor munculnya golongan terpelajar pada awal abad ke-20 dalam masyarakat Indonesia adalah...
 - Lahirnya Boedi Oetomo
 - Lahirnya organisasi pemuda
 - Dilaksanakannya politik etis
 - Dilaksanakannya politik *divide et impera*
 - Dilaksanakannya politik liberal
 - Secara historis pelajar, mahasiswa, dan pemuda mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap perubahan ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perannya pada masa Pergerakan Nasional adalah ...
 - membangun sekolah tinggi kedokteran Jawa STOVIA
 - melakukan perlawanan bersenjata melawan kolonialis Belanda
 - sebagai pelopor dan penggerak pergerakan nasional Indonesia
 - mendorong Belanda untuk mengakhiri pelaksanaan Taman Paksa
 - menuntut Belanda untuk membalas budi baik bangsa Indonesia
 - Gerakan untuk menggalang aksi dan melancarkan demonstrasi menuntut pembubaran PKI dan organisasi massa di bawahnya merupakan salah satu tuntutan dari Tritura yang diprakarsai oleh organisasi ...
 - KAMI
 - PMKRI
 - HMI
 - GMNI
 - PMII
 - Angkatan 66 terbentuk bertujuan untuk
 - membubarkan Partai Komunis Indonesia
 - membentuk orde baru
 - memperlemah kepemimpinan Soekarno dalam sistem perpolitikan di Indonesia
 - menurunkan harga bahan pokok
 - merebut kekuasaan Soekarno
 - Berikut ini isi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), kecuali ...
 - Bubarkan PKI
 - Bubarkan kabinet Dwikora
 - Turunkan harga
 - Kembali ke UUD 1945

- e. Tolak Presiden seumur hidup
8. Demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang akhirnya memicu terjadinya kerusuhan pada 15 Januari 1974 lebih dikenal sebagai peristiwa Malari. Penyebab utama terjadinya peristiwa tersebut adalah ...
- a. terjadinya krisis politik dan ekonomi yang melanda di Indonesia
 - b. adanya sentimen keagamaan dalam tubuh partai politik
 - c. adanya kecurangan pada pelaksanaan pemilihan umum
 - d. protes mahasiswa terhadap masuknya modal asing ke Indonesia
 - e. pembubaran secara paksa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa
9. Setelah berbagai peristiwa panjang, Soeharto pun mengakhiri masa kekuasaannya pada
- a. 19 Mei 1998
 - b. 20 Mei 1998
 - c. 21 Mei 1998
 - d. 22 Mei 1998
 - e. 23 Mei 1998
10. Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi, salah satunya pada hukum, yaitu:
- a. memperbarui berbagai perundang-undangan
 - b. meninjau kembali undang-undang subversi
 - c. menghilangkan praktek monopoli
 - d. menghilangkan persaingan tidak sehat
 - e. amandemen UUD 1945